

Disparitas Kesejahteraan Masyarakat Terdampak Covid 19 Sebelum dan Sesudah Adanya Program Keluarga Harapan (PKH)

Udik Jatmiko^{✉1}, Miftahul Munir², Ahmad Jauhari³

^{1,2,3} Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri Kediri

DOI: [10.37531/sejaman.v4i1.929](https://doi.org/10.37531/sejaman.v4i1.929)

Abstrak

Kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan mulai terabaikan terlebih dengan adanya virus covid 19 yang mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan pemberian bantuan baik tunai ataupun non tunai untuk menutup kesenjangan masyarakat khususnya Program Keluarga Harapan (PKH). Responden dalam penelitian ini sebanyak 115 KPM PKH di Desa Boro Kedungwaru Tulungagung. Analisis data menggunakan statistik perbandingan dengan *uji paired sample t test*. Berdasarkan uji komparatif *paired sample t test* diperoleh hasil bahwa dengan nilai t hitung sebesar $3,715 > t_{\text{tabel}}$ sebesar $1,658$ dengan nilai probabilitas sig. t test sebesar $0,000 < 0,05$. maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak yang berarti terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kesejahteraan kelompok penerima manfaat (KPM) di masa pandemi covid 19 sebelum dan sesudah menerima bantuan program keluarga harapan (PKH). Disparitas kesejahteraan masyarakat yang terdampak covid 19 dengan adanya PKH tercatat tidak efektif, hal ini terlihat dari aspek sasaran yang menerima bantuan PKH tidak terdata secara tepat dan data masih tumpang tindih dengan penerima bantuan program lainnya.

Kata Kunci: *Disparitas, Kesejahteraan Masyarakat, Program Keluarga Harapan*

Abstract

The welfare of the community in rural areas is starting to be neglected, especially with the covid 19 virus that attacks all aspects of people's lives, which requires the government from the center to the regions to take policies to provide cash and non-cash assistance to close gaps that exist in the community, one of which is the policy granting the Family Hope Program (PKH). Respondents in this study were 115 KPM PKH in Boro Village, Kedungwaru Tulungagung. Data analysis used comparative statistics with paired sample t test. Based on the comparative test of paired sample t test, the result is that with a t -count value of $3.715 > t_{\text{table}}$ of 1.658 with a probability value of sig. t test of $0.000 < 0.05$. it can be concluded that H_a is accepted and H_o is rejected, which means that there is a significant average difference between the welfare of the beneficiary group (KPM) during the COVID-19 pandemic before and after receiving the Family Hope Program (PKH) assistance. The disparity in the welfare of the people affected by COVID-19 with the existence of PKH was noted to be ineffective, this can be seen from the aspect of targets receiving PKH assistance not being recorded properly and data still overlapping with recipients of other program assistance.

Keywords: *Disparity, Community Welfare, Family Hope Program.*

Copyright (c) 2021 Udik Jatmiko, M. Munir, A. Jauhari

✉ Corresponding author :

Email Address : udikjatkiko@uniska-kediri.ac.id (Jln. Sersan Suharmadji 38 Kota Kediri Jawa Timur)

Received 18 Januari 2021, Accepted 15 Maret 2021, Published 16 Juni 2021

PENDAHULUAN

Dunia pada saat ini disibukkan dengan perjuangan mengentaskan permasalahan yang sifatnya global yaitu adanya virus yang menular dengan sangat cepat biasa disebut Coronavirus Disease 2019 yang menyerang sendi pernapasan manusia. Keberadaan virus covid 19 ini memberikan dampak negatif yang begitu besar bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat pada saat ini. Provinsi Jawa Timur khususnya juga menjadi salah satu daerah yang memiliki angka penularan covid tinggi beberapa waktu lalu, di akhir periode penghujung tahun 2020. Jumlah total kasus terkonfirmasi covid 19 di Jawa Timur per April tahun 2021 sebanyak 146.324 kasus, Pasien meninggal sebanyak 10.578, kasus sembuh 133.751 (Yustanti dkk, 2020). Jumlah kasus terkonfirmasi covid 19 ini juga dirasakan di wilayah daerah khususnya Kabupaten Tulungagung, meskipun data sebaran covid 19 di wilayah ini sudah mengalami penurunan hingga saat ini terkonfirmasi belum ada penambahan kasus baru di Kabupaten Tulungagung. Keberadaan covid 19 saat ini memberikan bayang-bayang ketakutan dan kecemasan di sekitar kehidupan masyarakat. Pandemi yang berawal pada bulan Maret tahun 2020 ini sampai saat ini masih memberikan imbas yang besar khususnya pada aspek perekonomian negara-negara termasuk di Indonesia, hal ini terlihat dari perkembangan ekonomi yang melambat, baik ekonomi rumah tangga hingga aspek dunia perindustrian. Dampak tersebut terlihat dari berbagai sektor, seperti pada sub manufaktur yang terhambat dalam proses produksi. Sektor pariwisata, restoran, perhotelan dan beberapa usaha mikro kecil dan menengah juga terdampak dengan adanya kebijakan physical distancing, PSBB dan sebagainya (Ibrahim, 2020). Dampak tersebut mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang terkena imbas PHK, penurunan penghasilan dan usaha-usaha kecil masyarakat banyak yang gulung tikar, karena tidak bisa menutupi kerugian dan biaya operasionalnya.

Pemerintah Pusat menggelontorkan berbagai skema bantuan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Banyak program inovatif yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan solusi atas permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat Indonesia yaitu pandemi covid-19. Masalah mendasar selama pandemi covid-19 ini adalah kesejahteraan sosial. Program-program yang diterapkan oleh pemerintah tersebut bertujuan untuk mengurangi angka kesenjangan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya pada taraf kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan yang dialami oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya seperti tempat tinggal, makanan, pakaian ataupun kesehatan (Solikatur dkk, 2018). Penduduk miskin adalah golongan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan target pembangunan biasanya dirumuskan sebagai upaya mengentaskan golongan masyarakat miskin agar mereka mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan dapat berada di atas garis kemiskinan (Itang, 2015).

Salah satu daerah yang patut menjadi fokus observasi dan pengamatan terkait dengan efektivitas pelaksanaan pemberian program keluarga harapan (PKH) adalah Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Tulungagung. Pada pelaksanaannya jumlah dana bantuan PKH Perkeluarga berbeda-beda tergantung kepada jumlah komponen dalam keluarga yang bisa menerima dana tersebut, apabila banyak terdapat jumlah komponen dalam keluarga yang menerima maka semakin banyak juga jumlah dana yang diterima. Jumlah dana yang diterima oleh setiap komponen antara lain :

Tabel 1. Data Jumlah Penerima Bantuan PKH per Keluarga

No	Komponen	Jumlah	Waktu
1	Ibu Hamil	Rp. 250.000	1 Bulan
2	Balita	Rp. 250.000	1 Bulan
3	Anak SD	Rp. 75.000	1 Bulan
4	Anak SMP	Rp. 125.000	1 Bulan
5	Anak SMA	Rp. 166.000	1 Bulan
6	Lansia	Rp. 200.000	1 Bulan
7	Disabilitas	Rp. 200.000	1 Bulan

Sumber : PKH Desa Boro, 2021.

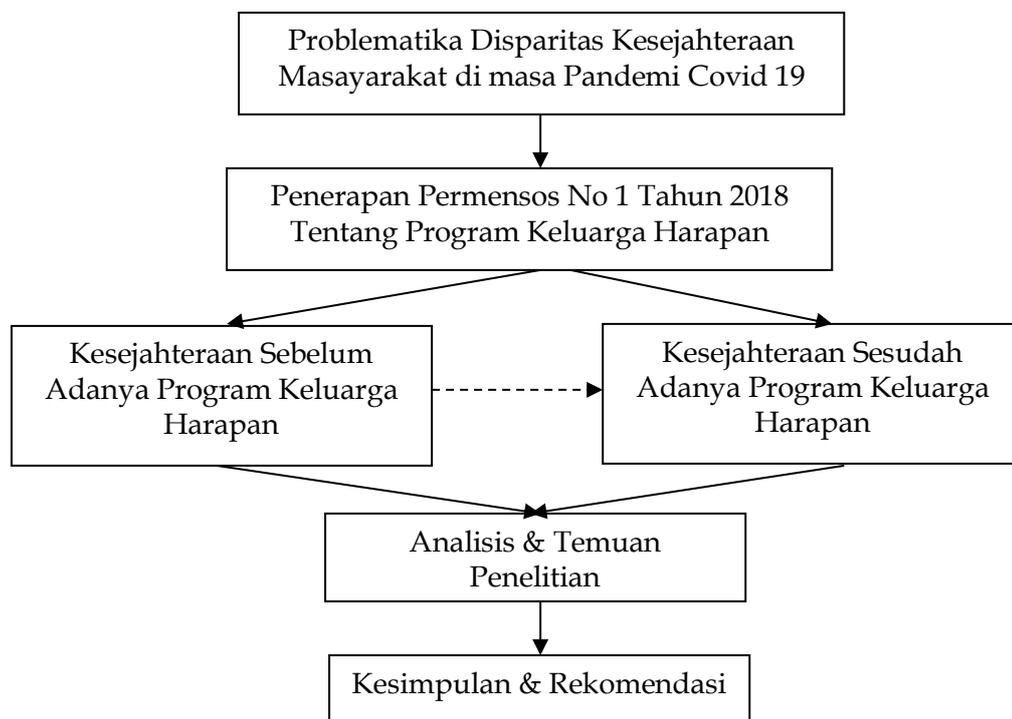
Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan dana PKH setiap bulan sekali dikarenakan adanya Pandemi Covid-19, sebelum adanya pandemi dana PKH tersebut disalurkan setiap tiga bulan sekali. Kemudian pada masa Pandemi ini ada perubahan besaran dana yang diterima oleh setiap komponen. Dengan besaran dana yang diterima oleh setiap komponen tersebut bahwa setiap penerima PKH harus menggunakan bantuan tersebut untuk keperluan seperti sasaran pemerintah yaitu untuk pendidikan dan kesehatan, maka penulis ingin melakukan evaluasi terkait pemanfaatan dana PKH tersebut (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018).

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Desa Boro terkait pelaksanaan pemberian program keluarga harapan (PKH), belum terlaksana dengan efektif. Hal ini terlihat dari berbagai masalah di dalam pelaksanaannya seperti pada sasaran penerima yang di tuju, terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah di tentukan sebelumnya serta sosialisasi yang dilakukan dirasa masih kurang kepada seluruh masyarakat kelompok penerima manfaat (KPM), berdasarkan observasi yang di lakukan peneliti sebelumnya di lapangan, di temukan bahwa dalam pelaksanaan program BST masih belum transparan. Permasalahan tersebut diindikasikan disebabkan oleh adanya tumpang tindih validasi dan verifikasi data KPM di desa tersebut, kesalahan ini terlihat dari segi administrasi pembagian data antara penerima PKH dan BPNT sehingga data-data yang meliputi PKM masih berupa data lama karena kurangnya peran para operator atau verifikator dalam melakukan pemutakhiran data. Problematika mengenai tidak efektifnya PKH yang diberikan pihak desa kepada masyarakat penerima bantuan (KPM) akan mengakibatkan kerancuan sosial di masyarakat, sentimen pribadi, kecemburuan sosial serta ketidakpercayaan masyarakat kepada pelaksana program keluarga harapan tersebut. Sesuai dengan kajian penelitian terdahulu apabila program bantuan PKH kurang tepat sasaran, maka faktor penyebabnya adalah antara realisasi penerima PKH dengan target penerima PKH tidak sesuai dengan validasi data (Hidayat, 2018). Hal ini berbeda dengan kajian bahwa apabila program keluarga harapan dapat berjalan dengan efektif maka dapat sangat membantu dalam menanggulangi kemiskinan yang ada. Hal ini merupakan salah satu faktor penting yang juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada saat ini. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan, akibat dari pelaksanaan program yang masih belum sesuai antara data dilapangan dengan data yang disusun oleh tim pelaksana yang memungkinkan beresiko terhadap ketidakpercayaan para kelompok penerima manfaat tersebut (Nuraida, 2020).

Dalam Program Keluarga Harapan (PKH), manfaat bantuan yang diterima oleh penerima manfaat Program Keluarga Harapan terdiri dari beberapa item

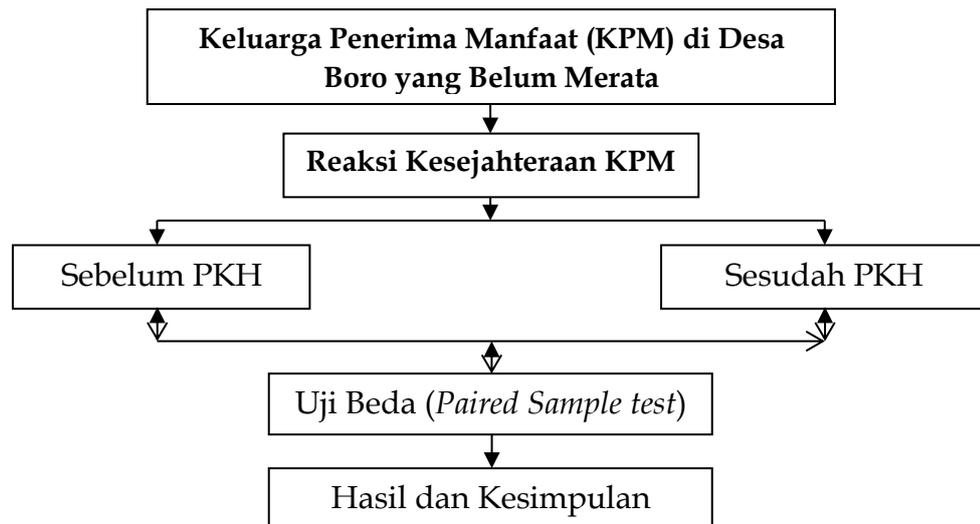
bantuan, yaitu : pemberian bantuan uang *non tunai* yang nominal perolehan setiap Keluarga Sangat Miskin (KSM) berbeda-beda tergantung dari klasifikasi anggota keluarganya . Kemudian juga menerima layanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita di Puskesmas, Posyandu, dan Polindes. Menerima layanan pendidikan bagi anak penerima manfaat Program Keluarga Harapan, serta menerima bantuan program kewirausahaan.

Gambar 1. Alur Konsep Teoritis Penelitian



METODOLOGI

Pendekatan penelitian ini melalui desain penelitian komparatif (Sugiyono, 2018). Pendekatan ini dilakukan karena menjelaskan tentang perbedaan (disparitas) antara kesejahteraan masyarakat terdampak covid 19 sebelum dan sesudah menerima program keluarga harapan (PKH). Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti memerlukan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan sebagai Penelitian ini adalah para kelompok penerima manfaat PKH di Desa Boro Kedungwaru Tulungagung yang secara data telah terverifikasi dengan kevalidan data penerima di Kementerian Sosial sebanyak 115 orang. Instrumen penelitian ini adalah kuisioner penelitian serta menggunakan metode deskriptif kuantitatif melalui analisis *Paired Sample t Test* (Ghozali, 2013). Pengujian dilakukan dengan pembuktian hipotesis t dengan tingkat signifikan 0,05. Dalam penelitian komparatif yang akan dilakukan ini, perlu sebuah rancangan penelitian sebagai berikut :

Gambar 2. Rancangan Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji *Paired Sample t Test* Teknik statistik yang berfungsi untuk menguji signifikansi perbedaan *Mean* antara dua kelompok atau variabel yang berskala interval/ratio dan berdistribusi normal. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini mengenai perbedaan kesejahteraan masyarakat kelompok penerima manfaat (KPM) terdampak covid sebelum dan sesudah adanya PKH, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. Uji Paired Sampel t Statistik

Variabel	Rata-Rata (<i>Mean</i>)	Kesimpulan
Kesejahteraan Sebelum PKH	42.28	Rata-rata nilai kesejahteraan masyarakat PKM sesudah menerima PKH lebih tinggi dibandingkan dengan Sebelum menerima PKH
Kesejahteraan Sesudah PKH	44.63	

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa rata-rata (*mean*) kesejahteraan masyarakat kelompok penerima manfaat (KPM) terdampak covid sebelum adanya PKH sebesar 42,28. Sedangkan rata-rata kesejahteraan masyarakat kelompok penerima manfaat (KPM) terdampak covid sesudah adanya PKH sebesar 44,63 Hal ini dapat dijelaskan bahwa terdapat disparitas (perbedaan) rata-rata kesejahteraan masyarakat kelompok penerima manfaat (KPM) terdampak covid 19 sebelum dan sesudah adanya PKH.

Tabel 3. Uji Korelasi

Nilai Korelasi	Signifikan Korelasi	Taraf signifikan	Kesimpulan
0,619	0,000	dibawah 0,05	Terjadi hubungan yang kuat dan searah

Hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa hubungan kedua variabel dinyatakan sebesar 0,657 dengan nilai signifikansi 0,000. Dapat diartikan bahwa hubungan antara variabel kesejahteraan masyarakat kelompok penerima manfaat (KPM) terdampak covid sebelum dan sesudah adanya program PKH mempunyai secara nyata dalam kategori kuat, hal ini juga dibuktikan dengan nilai signifikasinya dibawah ketentuan sebesar $< 0,05$.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	T hitung	Sig. (2-tailed)	Taraf Signifikan	Kesimpulan
Kesejahteraan masyarakat kelompok penerima manfaat (KPM) terdampak covid sebelum dan sesudah adanya PKH	3,715	0,0000	dibawah 0,05	Ha diterima dan Ho ditolak

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat dijelaskan hasil analisis bahwa nilai t hitung sebesar $3,715 > t_{\text{tabel}}$ sebesar 1,658 dengan nilai probabilitas sig. t test sebesar $0,000 < 0,05$. maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti terdapat perbedaan rata-rata kesejahteraan kelompok penerima manfaat (KPM) di masa pandemi sebelum dan sesudah menerima bantuan program keluarga harapan (PKH).

Efektivitas Program Bantuan Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Boro Kedungwaru Tulungagung

Efektivitas merupakan suatu ukuran hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil secara nyata dan sesungguhnya. Efektivitas dapat juga dikatakan suatu perbandingan antara output dan tujuan suatu program. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian target yang dibebankan, maka semakin baik pula tata kelola organisasi atau organisir program atau kegiatan. Hasil perhitungan mengenai efektivitas pemberian bantuan keluarga harapan (PKH) di Desa Boro Kedungwaru Tulungagung secara keseluruhan dapat dideskripsikan bahwa pada tahun 2020/2021 jumlah kelompok penerima manfaat ditargetkan sebesar 295 orang, sedangkan realiasi pemberian bantuan PKH ini hanya tercapai sebanyak 115 kelompok penerima manfaat. Prosentase pemberian bantuan PKH pada kelompok masyarakat terdampak covid 19 hanya mencapai 38,9% artinya berdasarkan kategori berada pada interval $< 60\%$ sesuai ketentuan dapat dikatakan tidak efektif.

Temuan penelitian di atas menunjukkan bahwa kegiatan pemberian bantuan program keluarga harapan oleh pemerintah Desa Boro tercatat tidak efektif, hal ini terlihat dari aspek sasaran yang menerima bantuan PKH tidak terdata secara tepat. Terdapat keluarga penerima manfaat (KPM) yang masih tumpang tindih, karena keberadaan data awal yang menjadi acuan adalah data dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), hal ini menunjukkan ketidakmampuan pelaksana dalam melakukan pemilihan sasaran. Permasalahan lain terlihat dari aspek sosialisasi program PKH, aparat yang berperan dalam pelaksanaan program PKH masih belum sepenuhnya memahami rujukan teknis yang telah diberikan

Pemerintah Daerah, begitu pula sebaliknya masyarakat desa juga tidak memahami tujuan bantuan PKH ini. Tidak efektifnya pelaksanaan program PKH ini juga terlihat dari aspek tujuan pemberian dana bantuan PKH ini tidak tersampaikan kepada masyarakat penerima, artinya transparansi informasi mengenai PKH masih kurang maksimal diterima masyarakat desa.

Hasil penelitian penelitian ini juga diperkuat oleh argumentasi dari Melati & (Melati & Zulkarnaini, 2021) yang menyebutkan bahwa efektivitas pemberian bantuan sosial kepada masyarakat belum efektif, faktor penyebabnya adalah kevalidan data yang dipilih dengan sasaran yang ditetapkan. Berbeda pendapat dengan (Usman, 2014) efektivitas bantuan program keluarga harapan mampu memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat miskin.

Disparitas (Perbedaan) Kesejahteraan Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Sebelum Dan Sesudah Adanya Program Keluarga Harapan (PKH)

Disparitas merupakan kajian komparatif (perbandingan) yang difungsikan untuk mengukur perbedaan rata-rata kesejahteraan kelompok masyarakat penerima manfaat (KPM) sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pada proses penelitian ini akan dideskripsikan secara statistik uji komparasi mengenai kondisi kelompok masyarakat penerima manfaat (KPM) di Desa Boro Kedungwaru Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata (*mean*) kondisi kelompok penerima manfaat (KPM) sebelum menerima bantuan PKH di masa pandemi covid 19 sebesar 42,28. Sedangkan rata-rata kesejahteraan masyarakat kelompok penerima manfaat (KPM) terdampak covid sesudah adanya PKH sebesar 44,63. Dilihat dari hasil rata-rata tersebut dijelaskan bahwa masyarakat yang terdampak covid 19 ini, setelah mendapatkan bantuan program keluarga harapan kesejahtraannya mengalami perbedaan dibandingkan dengan sebelum menerima bantuan walaupun belum maksimal. Analisis disparitas mengenai kesejahteraan masyarakat yang terdampak covid 19 tersebut, juga dikaji dengan uji *paired sample t* dengan nilai t hitung sebesar $3,715 > t_{\text{tabel}}$ sebesar 1,658 dengan nilai probabilitas sig. t test sebesar $0,000 < 0,05$. maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kesejahteraan kelompok penerima manfaat (KPM) di masa pandemi covid 19 sebelum dan sesudah menerima bantuan program keluarga harapan (PKH).

Temuan penelitian tentang disparitas kesejahteraan masyarakat di masa pandemi covid 19 tersebut belum terlihat optimal. Sebelum menerima bantuan program keluarga harapan kondisi masyarakat di Desa Boro khususnya yang terdata menerima bantuan dilihat dari kesejahtraannya belum terpenuhi baik dari aspek ekonomi rumah tangga maupun aspek proses pencarian informasi yang sulit dan kurang transparan, keadaan ini yang membuat kesejahteraan di masa pandemi ini semakin berdampak negatif bagi masyarakat tersebut. Sebelum menerima bantuan PKH di masa pandemi covid 19 ini bila ditinjau dari standar kelayakan tempat tinggal KPM masih dibawah kategori layak. Selain itu kelengkapan fasilitas-fasilitas rumah tangga juga belum maksimal dan apabila dihubungkan dengan informasi adanya PKH ini warga penerima bantuan kurang memahami informasi prosedur penerimaan bantuan. Berbeda dengan kondisi saat ini setelah menerima bantuan PKH, kesenjangan mengenai kesejahteraan sedikit demi sedikit dapat terbantu meskipun faktanya kurang maksimal. Sesudah menerima bantuan PKH di masa pandemi covid 19 ini bila ditinjau dari bantuan yang diberikan pemerintah sudah

baik, terlihat dari indikator kesejahteraan warga yang menyatakan bahwa pengeluaran selama pandemi ini sangat terbantu dengan adanya program PKH. Selain itu, kemudahan mengakses layanan informasi kesehatan di masa pandemi covid dengan respon yang cepat oleh pelaksana PKH di tingkatan Desa Boro ditindak lanjuti secara cepat. Secara keseluruhan strategi dan kebijakan pemberian bantuan program keluarga harapan ini di desa Boro Kedungwaru Tulungagung belum berjalan sesuai realisasi khususnya tujuan utamanya dalam mensejahterakan warganya. Program keluarga harapan ini harusnya juga menjadi langkah dalam memberdayakan warganya agar lebih memiliki kemampuan meningkatkan otonomi rumah tangganya. Pemberdayaan warga yang harus dilakukan mengenai kesejahteraan, kemudahan akses informasi, peningkatan kesadaran, partisipasi dalam peningkatan mutu hidup (Jatmiko, 2016).

Fakta lain tentang kebijakan pemberian bantuan program keluarga harapan di Desa Boro Kedungwaru ini adalah tidak efektifnya sosialisasi mengenai kelompok penerima manfaat (KPM) di desa. Informasi yang diterima para KPM ini masih bersifat parsial, artinya banyak yang tidak mengetahui nilai bantuan yang seharusnya mereka terima penyebabnya adalah disinformasi yang disampaikan. Informasi tersebut selalu dilakukan menggunakan aplikasi whatsapp, sedangkan tidak semua KPM memiliki ponsel android dan paket data serta belum lagi terkendala koneksi jaringan. Hal demikian juga harus didukung oleh kinerja aparat pemerintah desa dan tim pelaksana tugas bantuan PKH yang ikut andil dalam memberikan transparansi dalam pemberian kebijakan-kebijakan terhadap warganya (Jatmiko, 2020). Hasil temuan ini juga sejalan dengan penelitian dari (Rosalia dan Hardjati, 2019) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan program bantuan kepada warga rata-rata kurang maksimal dalam menjamin kesejahteraan masyarakat baik berupa bantuan PKH atau BNPT. Argumentasi dari (Prayitna dkk., 2018) menyebutkan bahwa program keluarga harapan yang diberikan Kemensos RI di setiap daerah harus dilakukan evaluasi, agar kebijakan yang diberikan lebih tepat sasaran dalam pelaksanaannya.

Penyebab lain lemahnya kinerja pelaksana juga terlihat dari proses verifikasi data yang tidak sesuai dengan semestinya, hal ini terlihat dari fakta bahwa daftar penerima PKH dari Kemensos RI disampaikan langsung kepada Dinas Sosial dan pelaksana program di daerah, melalui bank penyalur dan aplikasi e-PKH untuk KPM. Verifikasi data perluasan tidak dilakukan sebagaimana semestinya, biasanya data penerima ini diverifikasi sebelum tahap penentuan KPM. Pada masa pandemi covid 19 ini verifikasi ini dilakukan cenderung hanya untuk melihat kesesuaian data yang sudah ada dengan dokumen kependudukan. Seharusnya pelaksana KPM dalam melakukan verifikasi data ini mendatangi rumah calon penerima manfaat atau membentuk ketua penerima bantuan PKH. Karena situasi pandemi ini data yang di verifikasi oleh pelaksana banyak tumpang tindihnya dengan penerima bantuan lain seperti BNPT ataupun bantuan sosial yang lain. Temuan ini juga diperkuat hasil penelitian yang menjelaskan bahwa ketika masa pandemi covid 19 ini semua lapisan masyarakat dapat terdampak, ketika data itu sama dan tumpang tindih bahkan ada masyarakat yang kesejahteraannya minim namun belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial. Maka dari itu fokus utama pemberian bantuan adalah keakuratan rancangan sasaran penerima yang tepat sesuai kriteria yang ditentukan, serta dilakukan pembaruan data secara continue (Zakiyah et al., 2020). Berbeda dengan kajian dari (Utomo, 2014) bahwa pelaksanaan program keluarga harapan

dapat meningkatkan kualitas hidup rumah tangga miskin, terlihat dari warga penerima manfaat yang merasa terbantu dengan adanya program PKH ini.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan secara rinci di atas, maka dapat disampaikan kesimpulan bahwa Prosentase pemberian bantuan PKH pada kelompok masyarakat terdampak covid 19 hanya mencapai 38,9% artinya berdasarkan kategori berada pada interval $< 60\%$ sesuai ketentuan dapat dikatakan tidak efektif. Analisis disparitas mengenai kesejahteraan masyarakat yang terdampak covid 19 tersebut, juga dikaji dengan uji *paires sample t* dengan nilai t hitung sebesar $3,715 > t_{\text{tabel}}$ sebesar $1,658$ dengan nilai probabilitas sig. t test sebesar $0,000 < 0,05$. maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak yang berarti terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kesejahteraan kelompok penerima manfaat (KPM) di masa pandemi covid 19 sebelum dan sesudah menerima bantuan program keluarga harapan (PKH). Dalam proses program bantuan PKH diharapkan ada evaluasi lagi, bagaimana cara dalam melakukan sosialisasi yang jauh lebih baik lagi dari pemerintah hingga sampai ke masyarakat dan juga untuk penentuan keluarga penerima bantuan diharapkan menggunakan data yang valid dan selalu terupdate dari setiap lokasi masyarakat penerima, sehingga tepat sasaran dapat terlaksana dengan baik.

Referensi :

- Ghozali, I. (2013). Ghozali, Imam (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, A. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bekasi Timur Kelurahan Margahayu. *Public Administration Jurnal (PAJ)*, 2(2).
- Ibrahim, A. M. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian dan Kebijakan Pemerintah Indonesia. *Sukabumiupdate.Com*.
- Itang. (2015). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. *Tazkiya*, 16(01).
- Jatmiko, U. (2016). Pengaruh Lingkungan Bisnis Dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Peningkatan Kinerja Pelaku UKM Pada Tahap Start-Up Di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 1(3), 235-246. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/ManajemenKewirausahaan/article/view/247>
- Jatmiko, U. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Sebelum dan Sesudah Pengalokasian Dana Desa. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*, 5(2). <https://doi.org/10.32503/jmk.v5i2.1007>. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/ManajemenKewirausahaan/article/view/1007>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. *Kementerian Sosial Republik Indonesia*, 2(187).
- Melati, M., & Zulkarnaini, H. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian. *Journal Publicuho*, 4(1). <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.16021>

- Nuraida, N. (2020). Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/paj.vi.741>
- Prayitna, R. G. I., Nurhaeni, I. D. A., & Demartoto, A. G. I. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Keberdayaan Perempuan di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1). <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22928>
- Rosaliana, A., & Hardjati, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. *Public Administration Journal of Research*, 1(2). <https://doi.org/10.33005/paj.v1i2.13>
- Solikaturun, S., Masruroh, Y., & Zuber, A. (2018). Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1). <https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17450>
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Alfabeta Bandung*.
- Usman, C. (2014). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi Di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo). *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 2(001).
- Utomo, D. (2014). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(1).
- Yustanti, W., Rahmawati, N., & Yamasari, Y. (2020). Klastering Wilayah Kota/Kabupaten Berdasarkan Data Persebaran Covid-19 Di Propinsi Jawa Timur dengan Metode K-Means. *JIEET (Journal of Information Engineering and Educational Technology)*, 4(1).
- Zakiah, N., Oktavia, L., Khairiyah, F., & Iman, M. A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15(2). <https://doi.org/10.20961/sp.v15i2.43501>